

## TAHAPAN JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Anzilna R. Nabella<sup>1</sup>, Tri Yuniningsih<sup>2</sup>, Titik Djumiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro

<sup>1</sup>anzilnanabella135@gmail.com; <sup>2</sup>triyuniningsih26@gmail.com; <sup>3</sup>titi\_artik@yahoo.co.id  
(024) 7460036

**Abstract.** *The development of Wonolopo Tourism Village has the aim of alleviating poverty, advancing community welfare. The development of the Wonolopo Tourism Village requires the participation of various actors. There were several stages that experienced problems related to the actor relationships within it. Shows that the actor network stages in the development of the Wonolopo Tourism Village are less than optimal. The aim of this research is to analyze the actor network stages in the development of the Wonolopo Tourism Village and analyze supporting and inhibiting factors. The method used in this research is descriptive qualitative. With data techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research explain that there are actors who have different views. The impact of tourism village has not been felt by the entire village community. The actions by Disbudpar Kota Semarang as the main actor have not been implemented optimally by Pokdarwis Manggar Selaras. Supporting factors in developing the Wonolopo Tourism Village are the same values, regular meetings, and openness of information. Meanwhile, the inhibiting factors are the potential not being integrated with each other, differences in interests, lack of community participation, not considering the renewal of SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012.*

**Keyword:** *development of tourism village, stages of actor network, tourism village.*

**Abstraksi.** *Pengembangan Desa Wisata Wonolopo memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi Wonolopo. Keterlibatan berbagai aktor dalam Desa Wisata Wonolopo akan membentuk sebuah jaringan. Hubungan aktor di dalamnya melalui sembilan tahapan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini menganalisis tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor yang memiliki perbedaan pandangan dan tidak dapat disatukan. Kurangnya partisipasi masyarakat secara umum dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sehingga dampak adanya desa wisata belum dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tindakan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang diberikan Disbudpar Kota Semarang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pokdarwis Manggar Selaras. Faktor pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu adanya kesamaan nilai antar aktor, terdapat pertemuan rutin dalam bentuk forum komunikasi, komunikasi antar aktor melalui platform whatsapp, adanya keterbukaan informasi oleh setiap aktor. Sedangkan faktor penghambat yaitu potensi tidak saling terintegrasi, adanya perbedaan kepentingan, partisipasi masyarakat kurang, dan tidak menganggap penting pembaruan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012.*

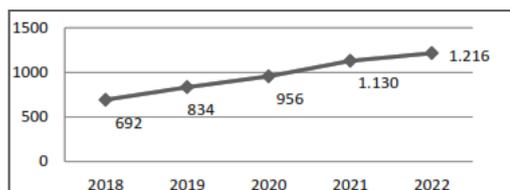
**Kata kunci:** *desa wisata, pengembangan desa wisata, tahapan jaringan aktor.*

## PENDAHULUAN

SDGs sebagai komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat memiliki 17 tujuan atau pilar. Beberapa pilar SDGs dapat dilihat melalui Gambar 1.1. Sesuai indikator masing-masing pilar SDGs, tahapan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata berkaitan dengan Pilar 1 Tanpa Kemiskinan. Pada pilar 1 Tanpa Kemiskinan terdapat beberapa target yaitu 1.1 pengentasan kemiskinan ekstrim, 1.2 mengurangi kemiskinan setidaknya 50%, 1.3 pelaksanaan sistem perlindungan sosial, 1.4 hak yang sama atas kepemilikan dan sumber daya ekonomi, 1.5 membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, 1.6 memobilisasi sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan, serta 1.7 menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitive gender.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah melalui target 1.7 karena kebijakan tentang desa wisata yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan menjadi strategi bagi pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah wisatawan terbesar setelah Jawa Timur yaitu 146,02 juta perjalanan dengan persentase mencapai 24,22% dari total perjalanan wisatawan di Indonesia pada tahun sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beragamnya potensi wisata yang dimiliki Jawa Tengah. Baik dari segi seni budaya, keindahan alam, dan sebagainya.



Gambar 1. Jumlah Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah (2018-2022)

Sumber: Disporapar Jawa Tengah

Kota Semarang sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki jumlah kunjungan wisata terbanyak yaitu 3.640.591 wisatawan. Menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi daerah di Jawa Tengah yang memiliki daya tarik wisata tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki total 76 objek wisata yang terdiri dari 16 wisata alam, 27 wisata budaya, dan 33 wisata buatan. Hingga saat ini Kota Semarang terus mengalami penambahan objek wisata, seperti Desa Wisata.

SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki 3 desa wisata yaitu Desa Wisata Wonolopo, Desa Wisata Kandri, dan Desa Wisata Nongkosawit Gunungpati. Desa Wisata Wonolopo pertama kali diinisiasi oleh masyarakat desa yang merasa bahwa Desa Wonolopo memiliki potensi wisata yang besar serta dilatarbelakangi oleh tingkat kemiskinan masyarakat desa yang tinggi.

Desa Wisata Wonolopo memiliki konsep sistem pariwisata berkelanjutan. Tujuan Desa Wisata Wonolopo yaitu mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau aset yang terdapat di kawasan Wonolopo sebagai promosi pariwisata kepada para wisatawan, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, serta

mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, bermartabat dan sejahtera. Pengembangan desa wisata sesuai Pergub Nomor 53 Tahun 2019 meliputi pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan dan kerjasama kemitraan.

Desa Wisata Wonolopo memiliki dua pokdarwis, yaitu Pokdarwis Manggar dan Pokdarwis Wonolopo. Terbentuknya dua Pokdarwis bertujuan agar potensi Desa Wisata Wonolopo dapat dikelola dengan baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi kedua pokdarwis belum saling terintegrasi dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pengelola desa wisata hanya berjumlah satu dengan tugas mengatur desa wisata, membina usaha kepariwisataan, menyelenggarakan kerjasama pihak ketiga, dan berkoordinasi dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo belum cukup baik karena masyarakat hanya berpartisipasi saat terdapat kunjungan wisata. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa wisata hanya masyarakat yang bekerja secara lepas dan memiliki usaha yang berkaitan langsung dengan desa wisata.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tahap problematisasi dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo mengalami resistensi karena desa wisata belum terintegrasi sepenuhnya serta minimnya partisipasi masyarakat.

Pengembangan desa wisata membutuhkan peran dari berbagai pihak khususnya pemerintah. DISBUDPAR Kota Semarang sebagai aktor yang memfasilitasi

pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo berkontribusi dalam pelatihan. Namun, pokdarwis belum maksimal dalam mengikuti arahan DISBUDPAR karena menganggap pelatihan bersifat monoton. Aksi-aksi yang dimunculkan oleh aktor utama (DISBUDPAR) telah dilaksanakan, tetapi aktor pelaksana (pokdarwis) belum mampu mengikuti tindakan yang dimunculkan oleh aktor utama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap *interesement* atau tahap di mana tindakan-tindakan dimunculkan oleh aktor utama untuk menarik aktor lain dalam mencapai tujuan mengalami permasalahan.

Desa Wisata Wonolopo hingga saat ini masih mengalami permasalahan dalam hal pengelolaan media sosial. Meskipun peran universitas dalam meningkatkan keaktifan pokdarwis sebagai salah satu sarana mengembangkan Desa Wisata Wonolopo telah dilibatkan, hampir semua penyelesaian masalah tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan berhenti di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pelibatan atau *enrollment* aktor pendukung kurang maksimal dalam memerankan perannya.

Keterlibatan berbagai aktor dalam pengembangan desa wisata akan membentuk sebuah jaringan. Dalam jaringan yang terbentuk akan diketahui bagaimana para aktor saling berhubungan melalui tahapan yang dilakukan. Jaringan aktor dinilai stabil dilihat melalui tahapan yang dilalui yaitu *punctualization*, *translation*, *problematization*, *interesement*, *enrollment*, *inscription*, *speaker/delegate representative*, *betrayal*, dan *irreversibility*. Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo tahapan jaringan aktor belum optimal karena terdapat permasalahan khususnya pada tahap

*problematization, interessement, dan enrollment.*

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam membentuk jaringan aktor ditemui permasalahan atau resistensi yang dilatarbelakangi oleh tahapan yang kurang maksimal. Oleh karena itu tahapan jaringan aktor menjadi kunci untuk melihat bagaimana aktor terbentuk dalam sebuah jaringan dan melihat hubungan antar aktor di dalam sebuah jaringan. Sehingga pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dengan pertanyaan penelitian “Mengapa tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang belum optimal?”

Menurut Clark Cochran (2010) Kebijakan publik adalah hasil perjuangan pemerintah menentukan siapa mendapat apa. Sederhananya kebijakan publik merupakan penjumlahan berbagai kegiatan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kehidupan warga negara (B. Guy Peters, 2010). Kebijakan publik juga diartikan sebagai sesuatu yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah (Thomas Dye, 2017).

William Dunn (2018) menyatakan bahwa kebijakan publik menjelaskan skema pengambilan keputusan yang meliputi *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy assessment, dan policy adaptation*. Alur atau proses berfungsi untuk memvisualisasikan rangkaian fungsi yang saling bergantung dan tersusun sepanjang waktu. Setiap fase

kebijakan terhubung ke fase selanjutnya, serta sebagai proses yang utuh tidak memiliki akhir.

Penelitian ini berada pada proses implementasi kebijakan karena pengembangan Desa Wisata Wonolopo dilaksanakan sesuai aturan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Penetapan kebijakan ini menjadikan Desa Wisata Wonolopo sebagai desa wisata berbasis budaya dan berbasis daya tarik kerajinan. Dengan ditetapkannya Desa Wisata Wonolopo sebagai salah satu daya tarik wisata di Kota Semarang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki serta keterlibatan masyarakat di dalamnya.

### **Jaringan Aktor**

Menurut Latour dalam Trianggono dkk (2018) aktor adalah satu kesatuan elemen yang saling berjejaring. Artinya aktor merupakan kesatuan jaringan yang memiliki interaksi di dalamnya dalam mencapai tujuan, sehingga aktor tidak diartikan sebagai individu atau elemen non manusia. Aktor melaksanakan aksi atau tindakan (*action*) karena adanya agensi (*agency*) dan aktan (*actant*) (Arinda & Shambodo, 2019).

Seorang aktor membutuhkan sumber daya untuk melindungi keberadaan dan kepentingannya, kemudian menghasilkan jaringan aktor yang saling berkomunikasi. Titik awal pendekatan antar aktor dimulai dari lingkungan aktor yang berhubungan dengan aktor lainnya (Yuniningsih, 2018). Pada teori jaringan aktor melihat hambatan dapat diatasi melalui jaringan sehingga tercipta kestabilan, melihat cara mengatur

dan menerjemahkan elemen-elemen jaringan juga proses meyakinkan aktor lain untuk turut andil dalam kepentingan yang akan diwujudkan melalui pembagian peran, dan memberdayakan orang lain atau aktor agar memiliki fungsi. Para aktor bertindak berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan, dan cukup saling memahami, atau timbulnya kesalahpahaman yang dapat menciptakan interaksi secara nyata.

### **Tahapan Jaringan Aktor**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahapan diartikan sebagai bagian dari perkembangan, bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhir, dan bagian dari urutan tingkat. Dalam jaringan aktor, di dalamnya terdapat tahapan atau tingkatan bagaimana aktor-aktor saling berhubungan dan berinteraksi. Jaringan yang terbentuk mengalami proses penyesuaian aksi-aksi, yang dikenal sebagai translasi.

Menurut Callon (1990) hubungan antar aktor pada jaringan dilihat melalui empat tahapan, diantaranya:

1. *Problematisasi (Problematization)*. Ketika inisiator aksi memunculkan isu.
2. *Penarikan (Interessement)*. Ketika proses problematisasi berhasil dilakukan, aktor yang terstimulasi memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju.
3. *Pelibatan (Enrollment)*. Situasi di mana para aktor mulai menjajaki kemampuan satu sama lain dengan mengirimkan delegasi atau perantara.
4. *Mobilisasi (Mobilization)*. Proses di mana bentuk jaringan aktor telah diidentifikasi.

Sedangkan menurut Yuniningsih (2018) tahapan jaringan aktor meliputi:

1. *Punctualization* merupakan tahapan mengidentifikasi jaringan aktor sesuai kepentingannya.
2. *Translation* tahap penerjemahan tujuan masing-masing aktor dengan aktor utama.
3. *Problematization* tahap perumusan masalah masing-masing aktor.
4. *Interessement* proses meyakinkan aktor lain untuk menerima definisi masalah melalui tindakan aktor utama.
5. *Enrollment* tahap aktor mulai menerima kepentingan yang ditetapkan aktor utama dalam jaringan.
6. *Inscription* penciptaan simbol atau perjanjian untuk melindungi kesepakatan.
7. *Speaker/Delegate Representative* aktor sebagai juru bicara atau perwakilan.
8. *Betrayal* kondisi aktor menyeleweng dari kesepakatan.
9. *Irreversibility* tahap mengembalikan jaringan melalui langkah alternatif masing-masing aktor.

### **Pengembangan Desa Wisata**

Desa wisata adalah area yang menggabungkan atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya (Wihasta, 2012 dalam Maulana dkk, 2022). Unsur yang disajikan menjadi kesatuan dalam kehidupan masyarakat tanpa menghilangkan aturan dan nilai yang berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Menurut Prapita (2018:48) desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran, dan partisipasi masyarakat.

Pengembangan sebagai bagian dari pembangunan secara bertahap dan sistematis serta menjurus ke sasaran yang dikehendaki (Amerta, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan menekankan pada fase menciptakan sesuatu menjadi lebih baik. Sehingga dapat diartikan bahwa pengembangan menjadi satu bagian dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Pengembangan desa wisata dapat disimpulkan sebagai usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki desa wisata baik dari fasilitas, kondisi lingkungan, dan akomodasi, agar sejajar atau lebih maju dengan desa wisata lainnya melalui pelibatan aktor-aktor terkait seperti pemerintah dan swasta.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam membangun kepercayaan aktor pada sebuah jaringan terdapat beberapa nilai yang dapat mempengaruhi aktor dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan berafiliasi dengan aktor lain (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam tahapan pembentukan jaringan aktor dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai yang dibawa masing-masing aktor di dalam jaringan baik yang berasal dari individu atau kelompok.
2. Komunikasi, intensitas para aktor saling berkoordinasi dalam membahas permasalahan yang menjadi tujuan bersama.
3. Kepercayaan, terciptanya keyakinan antar aktor untuk menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan kepentingan bersama.
4. Sumber Kebijakan, sebuah wadah bagi para aktor-aktor dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan bersama melalui hubungan yang terbentuk menjadi sebuah jaringan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan fenomena sosial tertentu melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya melalui penyusunan sistematis, faktual dan akurat untuk menjelaskan hubungan dalam lingkungan penelitian.

Penentuan lokus dalam penelitian ini bertujuan memudahkan peneliti menentukan objek dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti melakukan penelitian di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kelurahan Wonolopo, Kota Semarang. Penentuan fokus penelitian bertujuan memperjelas subjek penelitian dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti menentukan fokus penelitian yaitu tahapan-tahapan jaringan aktor.

Subjek penelitian digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 8 (delapan) informan yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Diantaranya Pegawai Disbudpar Kota Semarang, Pegawai Disporapar Jawa Tengah, Kepala Kelurahan Wonolopo, Ketua Pokdarwis Manggar Selaras, Mahasiswi KKN USM, Pemilik Pendopo Kinanthi, dan Jurnalis Jawa Pos Semarang.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Data sekunder diperoleh melalui sumber lain seperti jurnal, buku, maupun dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Wonolopo pertama kali dibentuk sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Wonolopo. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Wonolopo, pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun desa wisata yang berkelanjutan.

Melalui Keputusan Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelurahan Wonolopo dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Penetapan Kelurahan Wonolopo sebagai desa wisata diawali dengan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Wonolopo agar menjadi tempat wisata bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Terletak di Kecamatan Mijen, Desa Wisata Wonolopo dapat ditemukan melalui jalan raya Semarang-Boja arah Kabupaten Kendal. Desa Wisata Wonolopo dapat diakses oleh wisatawan menggunakan bus ke Boja dan Cangkiran atau Bus Trans Semarang.

Desa Wisata Wonolopo memiliki berbagai potensi baik yang berkaitan dengan alam, budaya, dan sebagainya. Wonolopo memiliki beberapa kampung tematik, diantaranya Kampung Jamu, Kampung Ranting Pelangi, Omah Ampiran, Embung Wonolopo, Kampung Flora, Kampung Sepak Bola, *Go Green* Jadoel, dan Kampung Organik. Selain itu masih terdapat *homestay* yang dimiliki Desa Wisata Wonolopo seperti Pendopo Kinanthi yang dimiliki oleh perseorangan.

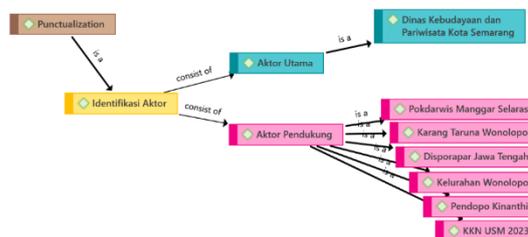
Berbagai potensi yang dimiliki Desa Wisata Wonolopo perlu dikelola oleh berbagai aktor-aktor yang saling berhubungan. Hubungan aktor dapat dilihat

melalui tahapan yang dilalui. Tahapan jaringan aktor menurut Callon dan Latour (2005) dalam Yuniningsih (2018) terdiri dari *Punctualization*, *Translation*, *Problematization*, *Interessement*, *Enrollment*, *Inscription*, *Speaker/delegate representative*, *Betrayal*, dan *Irreversibility*.

### Tahapan Jaringan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo

#### Identifikasi dan Kepentingan Aktor (*Punctualization*)

Menurut Poerdawarminta (dalam Pramita & Markeling, 2013) identifikasi sebagai bentuk penentuan yang dihasilkan dari penetapan identitas seseorang atau benda dalam penanganan masalah sosial tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Townsley (1998) dalam (Wakka, 2014) menjelaskan bahwa aktor dapat diidentifikasi menjadi aktor primer dan aktor sekunder.



Gambar 2. Identifikasi Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo  
Sumber: Diolah menggunakan *software* Atlas.ti (2024)

Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada pengembangan Desa Wisata Wonolopo berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan pada Pokdarwis Manggar Selaras. Pelatihan yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berupa peningkatan SDM, pelatihan pemandu wisata, dan pelatihan inovasi sajian kuliner. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terus melakukan pendampingan pembaruan SK. Dukungan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang lebih banyak pada penguatan SDM dan peningkatan mutu desa wisata. Aktor lain yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu Disporapar Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah di provinsi banyak memberi arahan dan pendampingan di setiap kegiatan Desa Wisata Wonolopo.

Sedangkan Disporapar Jawa Tengah, Kelurahan Wonolopo, Pokdarwis Manggar Selaras, Pendopo Kinanthi, KKN USM 2023, Karang Taruna Wonolopo, dan Jawa Pos Semarang sebagai aktor pendukung karena memiliki kepentingan secara tidak langsung dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo.

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo lebih banyak melibatkan masyarakat desa sebagai pemilik wisata, pemilik UMKM, dan kampung tematik. Masyarakat aktif bukan hanya pelaku wisata di Desa Wisata Wonolopo, Karang Taruna juga menjadi salah satu masyarakat yang aktif dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Selain itu, dukungan lain turut diberikan oleh universitas melalui penerjunan pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan Universitas Semarang. Serta keterlibatan media Jawa Pos Semarang sebagai penyebar informasi melalui berita.

### Penerjemahan Tujuan dan Kemampuan Aktor (*Translation*)

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai atau diharapkan oleh suatu organisasi atau individu. Tujuan meliputi penggambaran hal-hal yang perlu dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijakan, dan strategi (Gani, 2020:6). Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo yang melibatkan berbagai aktor memiliki tujuan yang berbeda.



Gambar 3. Penerjemahan Tujuan dan Kemampuan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo

Sumber: Diolah menggunakan *software* Atlas.ti (2024)

Setiap aktor yang terlibat mampu mewujudkan tujuan tersebut sesuai kemampuan dan perannya masing-masing. Disbudpar Kota Semarang dan Disporapar Jawa Tengah mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Sedangkan Kelurahan Wonolopo mengawasi setiap kegiatan di desa wisata. Pokdarwis Manggar Selaras dapat mewujudkan tujuan melalui pengelolaannya di desa wisata dengan melibatkan pemilik wisata dan pelaku UMKM. Universitas dan Karang Taruna Wonolopo mendukung tujuan desa wisata melalui promosi atau *branding*. Hal yang sama turut diberikan platform Jawa Pos Semarang sebagai media massa menyebarluaskan informasi dan mengenalkan Desa Wisata Wonolopo pada masyarakat luas.

Menurut Callon (1990) dalam proses penerjemahan terjadi pendefinisian tujuan terkadang terjadi kontroversi dan konflik. Hal ini terjadi pada Pendopo Kinanthi. Pendopo Kinanthi bertujuan mengembangkan potensi agar embrio-embrio di desa wisata tersentuh sepenuhnya bukan hanya sebagian. Sehingga potensi harus matang terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Sedangkan Pokdarwis Manggar Selaras memandang potensi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara bersamaan.

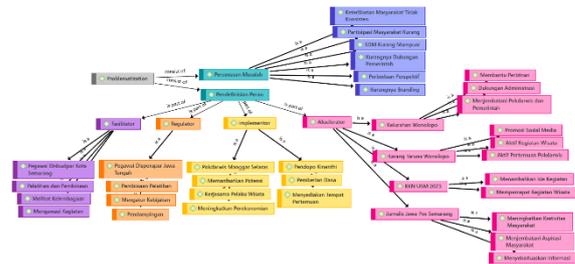
Perbedaan tersebut memicu munculnya ketidaksetaraan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Karena salah satu aktor merasa tujuan yang dimiliki tidak dapat diselaraskan dengan aktor lain. Sedangkan dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata menunjukkan bahwa dalam mengembangkan wisata yang melibatkan aktor-aktor di dalamnya memerlukan asas kesetaraan. Agar masing-masing aktor yang berkepentingan memiliki kedudukan yang sama di setiap tahapan pembangunan pariwisata termasuk pembangunan desa wisata. Sehingga proses penerjemahan (*translation*) dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo belum sempurna karena belum tercipta ruang bersama, kesetaraan, dan kesepadanan.

**Perumusan Masalah dan Pendefinisian Peran (*Problematization*)**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* (Dunn, 1994 dalam Nasution, 2021). Masalah juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan (Atmosudjiro, 1990:161 dalam Nasution, 2021). Sehingga permasalahan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Pengembangan Desa Wisata Wonolopo juga mengalami permasalahan.

Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama merumuskan satu permasalahan yang ada di Desa Wisata Wonolopo yaitu partisipasi masyarakat yang kurang. Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo keikutsertaan masyarakat secara umum belum merata dan belum konsisten. Masyarakat yang aktif hanya masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan desa wisata seperti pemilik wisata, pelaku UMKM, dan karang taruna. Sehingga

dampak adanya Desa Wisata Wonolopo belum dimiliki oleh seluruh masyarakat.



Gambar 4. Perumusan Masalah dan Pendefinisian Peran

Sumber: Diolah menggunakan software Atlas.ti (2024)

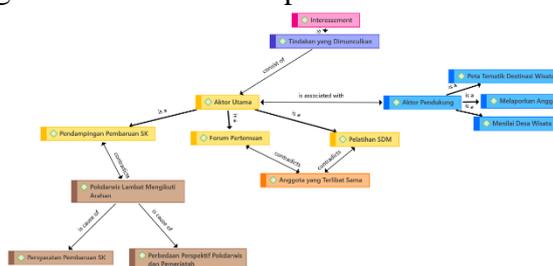
Hal ini tidak sejalan dengan Perda nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa desa wisata seharusnya melibatkan seluruh masyarakat agar manfaat adanya desa wisata juga dirasakan seluruh masyarakat desa. Selain itu, dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaksanaan pariwisata harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat baik dalam memberi peluang usaha maupun kesempatan kerja. Permasalahan lain yang ada di Desa Wisata Wonolopo berkaitan dengan SDM kurang mumpuni, serta perbedaan perspektif antar pelaku wisata seperti Pendopo Kinanthi dan Pokdarwis Manggar Selaras.

Menurut Riant Nugroho (2014) aktor dalam program pembangunan diklasifikasikan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Aktor yang berperan sebagai fasilitator yaitu Disbudpar Kota Semarang karena memfasilitasi Pokdarwis Manggar Selaras melalui pelatihan dan pembinaan, aktor yang berperan sebagai implementor yaitu Pokdarwis Manggar Selaras dan Pendopo Kinanthi, serta aktor berperan sebagai akselerator yaitu Kelurahan Wonolopo, KKN USM 2023, Karang

Taruna Wonolopo, dan Jawa Pos Semarang karena memiliki fungsi dalam mempercepat program desa wisata melalui kemampuan yang dimiliki seperti perizinan administrasi, bantuan ide, branding sosial media, dan menyebarkan informasi mengenai Desa Wisata Wonolopo.

### Tindakan yang Dimunculkan Disbudpar Kota Semarang (*Interessement*)

Tindakan merupakan perilaku yang memiliki makna (Weber dalam Supraja, 2012). Tindakan dapat berupa intervensi positif dalam sebuah situasi atau menahan diri dari intervensi (Schutz, 1972 dalam Supraja, 2012). Sedangkan menurut Thomason (1982) dalam (Supraja, 2012) tindakan memiliki ikatan subjek yang erat kaitannya dengan munculnya suatu perbuatan. Tindakan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam bentuk perbuatan atau aksi.



Gambar 4. Tindakan yang Dimunculkan Disbudpar Kota Semarang

Sumber: Diolah menggunakan *software* Atlas.ti (2024)

Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama memunculkan tindakan dalam bentuk mengadakan Forum Komunikasi Desa Wisata (FKD), pendampingan pembaruan SK, serta melakukan pelatihan dan pembinaan. Sesuai Pergub Nomor 53 Tahun 2019 pembinaan dilakukan dengan pelatihan di bidang manajerial, pelatihan di bidang pengembangan jaringan, pelatihan di bidang tata Kelola, serta penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan. Dalam hal ini, Disbudpar Kota Semarang telah

menginisiasi tindakan untuk meyakinkan aktor lain agar terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Disporapar Jawa Tengah, Kelurahan Wonolopo, dan Universitas menanggapi tindakan yang diberikan Disbudpar Kota Semarang sesuai tugas tanggung jawab seperti menilai desa wisata, melaporkan anggaran, dan pembuatan peta tematik.

Pokdarwis Manggar Selaras sebagai aktor pendukung tidak dapat mengikuti gerak Disbudpar Kota Semarang. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan perspektif antara Pokdarwis dan Disbudpar Kota Semarang. Pokdarwis menganggap pembaruan SK memiliki banyak persyaratan yang tidak dapat dituruti Pokdarwis, serta pandangan Pokdarwis yang menganggap pembaruan SK bukan hal penting. Hal ini menunjukkan bahwa aktor utama telah memunculkan tindakan agar aktor lain ikut terlibat, tetapi tindakan tidak dapat diikuti serta diterima secara maksimal oleh salah satu aktor.

### Pendelegasian Wewenang dan Penerimaan Kepentingan (*Enrollment*)

Menurut Charles J. Keating (1986) dalam Utami & Mauliana (2022) delegasi diartikan sebagai pemberian sebagian tanggung jawab serta kewibawaan terhadap pihak lain. Delegasi juga memiliki makna pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan secara formal untuk mendelegasikan tanggung jawab tersebut (Slamet, 2011) dalam Utami (2022).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki wewenang untuk mendampingi Pokdarwis Manggar Selaras dalam melaksanakan kegiatan desa wisata sesuai aturan yang berlaku yaitu SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012. Pendampingan tersebut meliputi pembaruan SK desa wisata, pelatihan dan pembinaan.

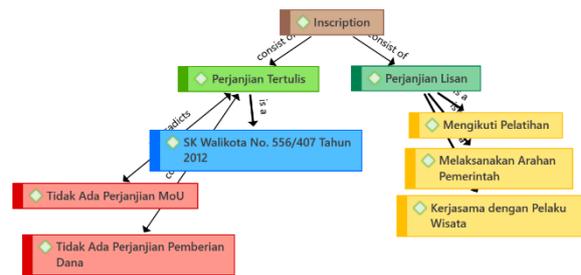
Wewenang yang sama dimiliki oleh Disporapar Jawa Tengah yaitu mengawasi kegiatan di Desa Wisata Wonolopo agar berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Intervensi Disporapar Jawa Tengah terhadap pengembangan Desa Wisata Wonolopo berkaitan dengan pengawasan, pembentukan regulasi, mempromosikan desa wisata, dan mengikutsertakan pokdarwis ke dalam pameran wisata. Sedangkan wewenang yang dimiliki Kelurahan Wonolopo sebagai penanggung jawab wilayah berupa pemberian izin dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan di Desa Wisata Wonolopo secara langsung.

Tetapi kepentingan yang dimiliki Pendopo Kinanthi tidak sejalan dengan Pokdarwis Manggar Selaras. Di mana kerjasama antara Pokdarwis Manggar Selaras dengan pelaku wisata lain belum merata sehingga dampak adanya Desa Wisata Wonolopo belum dirasakan secara seluruhnya. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan yang tercantum dalam Pergub Nomor 53 Tahun 2019 bahwa pemberdayaan di desa wisata harus melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat lokal dan mengedepankan kearifan lokal. Seharusnya pengembangan desa wisata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa baik pemilik wisata maupun pelaku UMKM seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga desa wisata dapat berjalan beriringan dengan embrio-embrio di dalamnya, serta tujuan menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

### Penciptaan Perjanjian (*Inscription*)

Perjanjian diartikan sebagai perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Subekti (1996:1) dalam (Ginting, 2020) perjanjian menerbitkan suatu ikatan antara dua orang yang membuatnya, perjanjian

berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang dituliskan.



Gambar 5. Bentuk Perjanjian Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo

Sumber: Diolah dengan *software* Atlas.ti (2024)

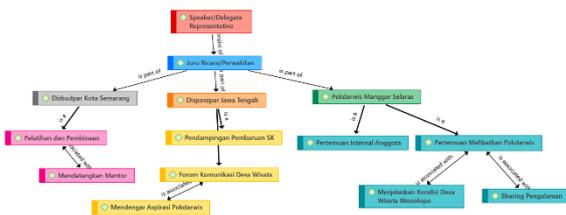
Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama memiliki kesepakatan bersama Pokdarwis Manggar Selaras sesuai aturan yang berlaku yaitu SK No. 556/407. Tetapi perjanjian-perjanjian lain seperti pemberian dana atau bantuan fisik lainnya tidak terbentuk. Disporapar Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Saat ini pemberlakuan SK No. 556/407 masih dalam proses pembaruan. Pembaruan SK penting dilakukan untuk mengetahui kelemahan desa wisata. Ketika kelemahan diketahui mampu diminimalisir bahkan dimanfaatkan menjadi kekuatan. Kelurahan Wonolopo memiliki pandangan yang sama dengan Disbudpar Kota Semarang dan Disporapar Jawa Tengah mengenai penciptaan kesepakatan. Kesepakatan yang dimiliki untuk mengembangkan Desa Wisata Wonolopo hanya berupa SK. Sehingga perjanjian-perjanjian lain seperti MoU tidak terbentuk.

Perjanjian atau kesepakatan antara Pokdarwis Manggar Selaras dengan pemilik wisata, pemilik UMKM, dan kampung tematik terjadi secara lisan dan berlandaskan bisnis. Terbentuknya kesepakatan secara lisan oleh pelaku wisata mampu

mewujudkan tujuan Desa Wisata Wonolopo yaitu menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan desa wisata.

**Aktor yang menjadi Perwakilan atau Juru Bicara (Speaker/Delegate Representative)**

Perwakilan merupakan individu yang mewakili kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Perwakilan juga disebut sebagai hubungan ketika seseorang atau kelompok membela, bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas (Bakti, 2018).



Gambar 6. Actor yang Menjadi Juru Bicara  
Sumber: Diolah dengan software Atlas.ti (2024)

Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama menjadi juru bicara ketika pelatihan dan pembinaan dengan mendatangkan mentor. Sedangkan Disporapar Jawa Tengah sebagai aktor pendukung menjadi juru bicara ketika pendampingan pembaruan SK dan Forum Komunikasi Desa Wisata (FKD). Dalam Forum Komunikasi Desa Wisata (FKD) tidak hanya Disporapar Jawa Tengah sebagai juru bicara, Pokdarwis Manggar Selaras turut menjadi juru bicara dalam FKD ketika membagikan pengalaman dalam mengelola Desa Wisata Wonolopo dan menjelaskan kondisi di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Pergub Nomor 53 Tahun 2019 yang menyatakan FKD sebagai sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan

kerjasama antar pengelola desa wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan desa wisata.

Disbudpar Kota Semarang sebagai aktor utama menjadi juru bicara ketika di dalam pertemuan yang mengharuskan pemerintah sebagai perwakilan seperti pelatihan dan pembinaan. Sedangkan dalam pertemuan yang di dalamnya melibatkan berbagai pokdarwis, juru bicara diwakili oleh Pokdarwis Manggar Selaras dengan tujuan membagikan pengalamannya dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Pokdarwis Manggar Selaras juga menjadi juru bicara dalam pertemuan internal dengan anggota lainnya. Sedangkan Disporapar Jawa Tengah turut menjadi juru bicara di pertemuan yang membahas kebijakan khususnya dalam pembaruan SK Desa Wisata Wonolopo.

**Penyelewengan Perjanjian (Betrayal)**

Menurut Herdiyanto penyelewengan atau penyimpangan diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan yang berlaku. Penyelewengan perjanjian juga diartikan sebagai situasi aktor yang tidak mematuhi kepentingan aktor di dalam jaringan (Callon & Latour dalam Yuniningsih, 2018).

Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo seluruh aktor yang terlibat baik Disbudpar Kota Semarang, Disporapar Jawa Tengah, Kelurahan Wonolopo, Pokdarwis Manggar Selaras, Universitas, dan Karang Taruna Wonolopo tidak pernah menyeleweng dari perjanjian atau aturan yang telah disepakati. Seluruh aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo menyatakan tidak ada pihak yang keluar dari kesepakatan atau menyeleweng.

Meskipun aktor-aktor tersebut tidak keluar dari jaringan, tetapi aktor yang bekerjasama dengan Pokdarwis Manggar

Selaras pernah menyeleweng dan tidak sesuai dengan tujuan awal. Salah satu pemilik wisata yang bekerjasama dengan Pokdarwis Manggar Selaras yaitu Mina Padi keluar dari tujuan awal karena tidak lagi mengutamakan masyarakat dan tidak menerapkan nilai-nilai pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dan asas pengembangan desa wisata yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata termasuk desa wisata harus menerapkan asas pemberdayaan agar setiap masyarakat desa berhak mendapatkan pemberdayaan dan harus diberdayakan agar dapat mengelola desa wisata dengan baik dan benar.



Gambar 7. Penyelewengan Perjanjian  
 Sumber: Diolah menggunakan software Atlas.ti (2024)

### Penciptaan Alternatif (*Irreversibility*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alternatif memiliki arti sebagai pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Alternatif juga diartikan sebagai opsi yang dapat diambil oleh suatu kelompok ketika menghadapi hambatan atau permasalahan tertentu. Dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo penciptaan alternatif terbentuk melalui langkah yang dimiliki masing-masing aktor untuk mengatasi hambatan.



Gambar 8. Penciptaan Alternatif  
 Sumber: Diolah dengan software Atlas.ti (2024)

Aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo baik Kelurahan Wonolopo, Universitas, Pendopo Kinanthi, dan Karang Taruna Wonolopo menyatakan masalah yang masih timbul adalah tidak bersatunya kedua pokdarwis sehingga mencari tempat masing-masing, akibatnya paket wisata tidak dikelola dengan baik dan melibatkan seluruh potensi di dalam desa wisata. Hambatan lainnya masyarakat kurang konsisten untuk terlibat dalam desa wisata sehingga terdapat potensi wisata yang berhenti dikelola.

Langkah alternatif untuk menyatukan kembali jaringan yang mengalami krisis dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu reorganisasi kepengurusan pokdarwis, merangkul birokrasi, dan mencari tokoh berpengaruh di desa wisata. Menumbuhkan niat seluruh masyarakat dan konsistensi masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Membuat paket wisata yang melibatkan seluruh potensi, mengikutsertakan CSR/Swasta dan memperbaiki koordinasi kedua pokdarwis agar tidak berebut wilayah atau lahan.

### Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Wonolopo

Faktor Pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo meliputi:

1. Kesamaan Nilai: Masing-masing aktor memiliki nilai yang sama yaitu menyejahterakan masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Baik pemerintah, pokdarwis, masyarakat, universitas, dan media massa memiliki nilai yang sama untuk memajukan Desa Wisata Wonolopo dengan menerapkan nilai

- pemberdayaan. Potensi yang dimiliki Desa Wisata Wonolopo dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik jika para aktor memiliki nilai yang sama.
2. Pertemuan Rutin: Komunikasi Desa Wisata (FKD). Di dalam FKD pemerintah dan pokdarwis dapat saling berkoordinasi mengenai kondisi yang ada di desa wisata. Setiap aspirasi pokdarwis dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah ketika kebijakan tidak berpihak pada pokdarwis atau desa wisata. Komunikasi secara langsung lebih intens melalui pertemuan-pertemuan di desa seperti PKK, Posyandu, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh Kelurahan Wonolopo dan Pokdarwis Manggar Selaras.
  3. Komunikasi melalui Platform *Whatsapp*: Aktor-aktor tidak selalu turun ke lapangan untuk melihat keberjalanan Desa Wisata Wonolopo, tetapi melalui media lain. Adanya komunikasi melalui media *whatsapp* sangat memudahkan aktor-aktor yang terlibat
  4. Keterbukaan Informasi: Setiap aktor harus memberikan kondisinya secara jujur. Keterbukaan informasi yang diberikan oleh masing-masing aktor dalam mendukung kemajuan Desa Wisata Wonolopo mampu meningkatkan kepercayaan aktor. Kepercayaan dapat terbentuk karena para aktor saling terbuka dalam membagikan informasi dan pandangannya sehingga kesalahpahaman maupun permasalahan yang terjadi mampu diminimalisir.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo diantaranya:

1. Tidak Saling Terintegrasi: Pengembangan potensi serta pemanfaatannya tidak merata. Saat ini Desa Wisata Wonolopo terkesan berjalan sendiri-sendiri karena perbedaan pandangan antara Pokdarwis Manggar Selaras dan Pokdarwis Wonolopo. Kurangnya komunikasi antara kedua pokdarwis mengakibatkan potensi-potensi yang ada di desa wisata tidak tersentuh seluruhnya. Komunikasi yang minim mengakibatkan kesalahpahaman antar kedua pokdarwis.
2. Perbedaan Pandangan: Perbedaan pandangan dan kepentingan antara Pokdarwis Manggar Selaras dengan Pemilik Pendopo Kinanthi menjadi hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Pendopo Kinanthi menginginkan potensi yang ada di desa wisata dikembangkan terlebih dahulu dibanding mencari hasil. Karena embrio yang ada di desa wisata masih banyak yang belum tersentuh sehingga kemajuan Desa Wisata Wonolopo tidak berjalan merata dan masih terpecah-pecah. Selain itu, masyarakat yang terlibat juga tidak memiliki pandangan yang sama dengan pemilik Pendopo Kinanthi untuk mengembangkan embrio di desa wisata.
3. Partisipasi Masyarakat Kurang: Masyarakat secara umum belum terlibat secara masif karena tidak adanya konsistensi di dalamnya. Sehingga terdapat potensi di Desa Wisata Wonolopo berhenti dikelola karena keterlibatan masyarakat tidak

dilakukan secara berkelanjutan. Padahal untuk memajukan desa wisata harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat pemilik wisata atau pelaku UMKM.

4. Tidak Menganggap Penting Pembaruan SK: Penetapan SK Walikota Nomor 556/407 Tahun 2012 menjadi pedoman bagi seluruh aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sehingga pembaruan SK yang tidak lagi relevan menjadi hal

penting serta perlu dilakukan sesegera mungkin. Tetapi pokdarwis tidak ingin memperbarui SK tersebut karena memandang pembaruan SK memiliki banyak persyaratan. Pokdarwis menganggap pembaruan SK tidak diperlukan selama paket wisata berjalan dan membuahkan hasil, begitu juga dengan pandangan salah satu pemilik wisata bahwa SK hanya sebagai lembar penguat tetapi tidak berpengaruh besar.

## SIMPULAN

Pada penelitian ini didapatkan bahwa tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo belum optimal karena terdapat permasalahan dalam penerapan tahapan-tahapan yang dilalui oleh setiap aktor. Yaitu terdapat perbedaan pandangan antara pemilik wisata dan pokdarwis, permasalahan ini berkaitan dengan tahap penerjemahan tujuan (*translation*). Kurangnya partisipasi masyarakat secara umum dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo menunjukkan bahwa pada tahap perumusan masalah dan pendefinisian peran (*problematization*) mengalami hambatan. Pokdarwis belum maksimal dalam mengikuti gerak atau arahan yang diberikan Disbudpar Kota Semarang, hal ini berkaitan dengan tahap tindakan yang dimunculkan aktor utama (*interessement*). Serta manfaat adanya desa wisata yang belum dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta belum terjamahnya seluruh potensi di Desa Wisata Wonolopo menunjukkan pada tahap pendelegasian wewenang dan penerimaan kepentingan (*enrollment*) belum berjalan dengan baik.

Pengembangan Desa Wisata Wonolopo memiliki faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mendukung pengembangan Desa Wisata Wonolopo yaitu adanya kesamaan nilai, terdapat pertemuan rutin berupa FKD, terjalannya komunikasi melalui whatsapp, dan adanya keterbukaan informasi. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu tidak terintegrasinya potensi wisata, adanya perbedaan pandangan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan belum menganggap penting pembaruan SK.

Saran yang dapat peneliti berikan agar permasalahan yang berkaitan dengan tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo dapat teratasi yaitu perlu adanya sinergitas antara kedua pokdarwis, pokdarwis dan pemilik wisata perlu koordinasi lebih lanjut untuk menyelaraskan keinginan, masyarakat perlu terlibat secara masif terutama anak muda, serta pokdarwis perlu melakukan pembaruan SK Walikota No. 556/407 Tahun 2012 agar kegiatan desa wisata memiliki payung hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan saran bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan

dengan pengembangan desa wisata. serta menambah referensi terhadap keilmuan yang berkaitan dengan tahapan jaringan aktor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E. (1977). *The Implementation Game: What Happens When a Bill Becomes a Law*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Birkland, T. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York, NY: Routledge.
- Callon, M. (1990). Techno-economic Networks and Irreversibility. *The Sociological Review*, 38(1\_suppl), 132–161.
- Cochran, dkk. (2010). *American Public Policy: An Introduction*, 10<sup>th</sup> Edition. Boston, MA: Cengage Wadsworth.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah*.
- Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6<sup>th</sup> Edition. New York: Routledge.
- Dye, Thomas. (2017). *Understanding Public Policy*, 15<sup>th</sup> Edition. Boston, MA: Pearson.
- Gani, Utama, dkk. (2020). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Mirqat.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hidayati, Rizki. (2022). *Sustainable Tourism Development di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, & dkk. (2018). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kraft, dkk. (2017). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. Thousand Oaks, CA: Sage/CQ Press.
- Latour, B. (2004). *Politics of Nature: How Bring the Sciences into Democracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Murdiyanto, E. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata*. Yogyakarta: Program Studi Agribisnis UPN "Veteran".
- Martin, K., Lee, K., Hall, J.P. (2021). *Public Policy: Origins, Practioce, and Analysis*. Georgia: Universirt of North Georgia Press.

- Nain, U. (2018). *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Nugroho, R., Suprpto, F. A. (2021). *Membangun Desa Wisata Bagian 2: Strategi Desa Wisata*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arindita, R., & Shambodo, Y. (2019). Tahapan Perilaku Aktor Jaringan Komunikasi Pada Sosialisasi Isu Bullying. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(2), 213–239.
- Ariyani, N., Fauzi, A., Umar, F. (2020). Model Hubungan Aktor Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23 (2), 357-378.
- Callon, M. (1990). Techno-economic Networks and Irreversibility. *The Sociological Review*, 38, 132-161.
- Cerna, L. (2013). *The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches*. ILE, OECD.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Fathoni, A. R. M. (2022). Analisis ANT (*Actor Network Theory*) dalam Presidensi G20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 1(1), 23–60.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., dkk. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (4). 355-369.
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.